



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
**UNIT KERJA** : STAF AHLI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
**SUB UNIT KERJA** : STAF AHLI BIDANG APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NANDANG HARIS**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**
3. NHK : **189914**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.322.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 467 m<sup>2</sup>/174 m<sup>2</sup> di KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 942.500.000
2. Tanah Seluas 192 m<sup>2</sup> di SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 67.200.000
3. Tanah Seluas 230 m<sup>2</sup> di SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.500.000
4. Tanah Seluas 5250 m<sup>2</sup> di SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m<sup>2</sup>/57 m<sup>2</sup> di KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.042.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 84.600.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 534.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	235.120.650
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	200.109.795
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.292.030.445
III. HUTANG	Rp.	300.463.800
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.991.566.645

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.